

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Evaluasi Program

a. Pengertian Evaluasi Program

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan evaluasi sebagai penilaian. Evaluasi merupakan kata serapan dari kata *evaluation* (bahasa Inggris) yang berarti penaksiran atau penilaian. Jadi, walaupun terdapat perbedaan bahasa, arti kata evaluasi tetap memiliki dasar yang sama yaitu penilaian. Dalam penggunaannya, evaluasi juga tidak terlepas dari makna penilaian itu sendiri.

Definisi evaluasi menurut para ahli dan sumber bacaan terpercaya lainnya juga telah banyak dikemukakan atau diterbitkan secara luas sehingga dapat digunakan untuk membantu memajukan perkembangan IPTEK. Kamus *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English* (AS Hornby, 1986) dalam Suharsimi dan Cepi (2007:1) menuliskan pengertian evaluasi adalah: "*to find out, decide the amount or value*" yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai dan jumlah. Jika diperdalam lagi, pengertian ini menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, berstrategi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengertian lain evaluasi yang dikemukakan oleh Suharsimi dan Cipi (2007:1) adalah: “evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan”. Dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa evaluasi tidak hanya berkaitan dengan penilaian saja, namun telah menjadi solusi dalam pengambilan keputusan. Bisa diartikan evaluasi adalah proses tindak lanjut dari penilaian.

Menurut Joan L. Herman dan Cs (1987) *Evaluator's Handbook* dalam Farida Yusuf (2000:9) program adalah: “segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh”. Menurut Trias Teknodik (2012) yang dikutip oleh Sukardi (2015:4) dikatakan bahwa program merupakan: “*as an educational activities that are provided on a counting based*” atau yang berarti program merupakan kegiatan pendidikan yang disediakan secara rutin. Apabila program dikaitkan dengan evaluasi program, maka dapat didefinisikan: “sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang” (Suharsimi Arikunto, 2007).

Setelah membahas pengertian evaluasi dan program secara terpisah, maka pengertian evaluasi dan program secara utuh menurut Ralph Tyler (1950) adalah: “proses yang dapat menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat tercapai”. Malcolm, Provus (1971) dalam Farida Yusuf (2000:3), mengatakan: “evaluasi sebagai perbedaan apa yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada selisih”. Pendapat lain mengatakan: “evaluasi program merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara cermat untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan/keberhasilan suatu program dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya.” (Sukardi, 2015:5).

Berdasarkan berbagai sumber di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa evaluasi program adalah proses mengumpulkan informasi akurat terhadap suatu program yang rutin dilaksanakan dalam suatu organisasi dengan membandingkan dengan suatu standar tertentu untuk dapat digunakan sebagai dasar atau alternatif menyusun kebijakan, pengambilan keputusan maupun menyusun program selanjutnya. Keberadaan evaluasi program dalam lembaga kependidikan ini sangat penting untuk menilai apakah program telah terlaksana secara efektif dan efisien atau belum. Evaluasi

program juga digunakan sebagai acuan apakah program tersebut akan dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan.

b. Tujuan Evaluasi Program

Tujuan evaluasi menurut Worten, Blaine R, dan James R, Sanders 1987 dalam Farida Yusuf (2000:2) adalah :

- 1) Membuat kebijaksanaan dan keputusan
- 2) Menilai hasil yang dicapai para pelajar
- 3) Menilai kurikulum
- 4) Memberi kepercayaan kepada sekolah
- 5) Memonitor dana yang diberikan
- 6) Memperbaiki materi dan program yang diberikan

Dari berbagai pemaparan tujuan evaluasi program tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi program bertujuan untuk meningkatkan usaha pelaksanaan program pendidikan secara menyeluruh (sasaran lebih luas). Hal ini sejalan dengan pendapat Chester T. Mc Nerney (1951) dalam Rusdiana (2017:23) yaitu: *“The purpose of any program of evaluation is to discover the needs of the individuals being evaluated and then design learning experiences that will satisfy these needs”*. Memiliki pengertian, tujuan evaluasi program adalah untuk menemukan kebutuhan setiap individu yang dinilai

dan kemudian digunakan untuk merencanakan pengalaman belajar.

c. Manfaat Evaluasi Program

Scriven (1967) menyatakan bahwa evaluasi memiliki 2 fungsi utama, yaitu:

- 1) Fungsi Formatif : evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (program, orang, produk, dsb)
- 2) Fungsi Sumatif : evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan.

Sehingga: “evaluasi hendaknya membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, menambah pengetahuan dan dukungan bagi mereka yang terlibat” (Farida Yusuf, 2000:4). Dapat dilengkapi dengan pendapat Rusdiana (2017:26) yang mengatakan: “evaluasi program berorientasi pada pengambilan keputusan (*decesion oriented*), yang menghasilkan rekomendasi dari evaluator untuk pengambilan keputusan”. Jadi, kebermanfaatan evaluasi program terhadap suatu program adalah sebagai pengambil keputusan apakah program tersebut dilanjutkan/ direvisi/ dihentikan.

d. Model Evaluasi Program

Model evaluasi merupakan desain terhadap suatu hal yang berfungsi sebagai penyederhana dan digunakan para evaluator untuk memperoleh pemahaman. Banyak model yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Beberapa model tersebut antara lain:

1) *Goal Oriented Evaluation Model* (Evaluasi Berorientasi Tujuan)

Model yang dikembangkan oleh Tyler ini, adalah model yang muncul paling awal. Objek pengamatan model ini adalah tujuan dari program yang telah ditetapkan sebelum program dimulai. Evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan, terus-menerus dan mengetahui sejauh mana tujuan tersebut telah terlaksana.

2) *Goal Free Evaluation Model* (Evaluasi Lepas dari Tujuan)

Model ini dikembangkan oleh Michael Scriven yang isinya berlawanan dengan model yang dikembangkan Tyler. Menurut Michael Scriven dalam Suharsimi dan Cepi (2007:25) adalah, “dalam melaksanakan evaluasi program evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program, namun perlu memperhatikan bagaimana

kerjanya program dengan mengidentifikasi penampilan yang terjadi (yang diharapkan dan tidak diharapkan)”).

Walaupun bernama evaluasi lepas dari tujuan, dalam pelaksanaannya bukan berarti lepas sama sekali dari tujuan, namun hanya lepas dari tujuan khusus. Pelaksanaan model ini hanya mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai oleh program.

3) *Formatif – Sumatif Evaluation Model*

Model lain yang juga dikembangkan oleh Michael Scriven ini, menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi. Pelaksanaan model evaluasi ini dilakukan pada waktu program masih berjalan (formatif) dan ketika program telah selesai (sumatif). Model evaluasi ini tidak membiarkan evaluator lepas dari tujuan, karena tujuan dari evaluasi formatif dan sumatif sangat berbeda.

Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berlangsung atau ketika pra pelaksanaan program. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang ada. Sehingga, pengambilan keputusan secara cepat dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran pencapaian tujuan program.

Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan setelah program berakhir. Evaluasi sumatif bertujuan untuk mengukur ketercapaian program. Fungsi evaluasi ini adalah untuk mengetahui posisi individu dalam suatu kelompok. Jadi, karena objek sasaran dan waktu pelaksanaan antara evaluasi formatif dan sumatif berbeda, maka lingkup sasaran yang dievaluasi juga berbeda.

4) *Countenance Evaluation Model*

Menurut Stake (1967) dalam Farida Yusuf (2000:1) ada 2 dasar kegiatan evaluasi ialah: “*Description* dan *Judgement*” serta membedakan 3 tahap dalam program pendidikan, yaitu: “*Antecedents (Context)*, *Transaction (Process)*, dan *Outcomes (Output)*”. Stake mengatakan: “apabila kita menilai suatu program pendidikan, kita melakukan perbandingan relatif antara satu program dengan yang lain, atau perbandingan absolut (satu program dengan standar)”. Dalam model ini, data dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dan standar yang absolut untuk menentukan manfaat dari program itu sendiri.

5) *CSE-UCLA Evaluation Model*

Suharsimi dan Cepi (2007:27) menjelaskan bahwa CSE-UCLA merupakan sebuah singkatan. CSE merupakan

singkatan dari *Center for the Study of Evaluation*, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari *University of California in Los Angeles*. Ciri-ciri model ini adalah adanya 5 tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil dan dampak.

Fernandes (1984) dalam Suharsimi dan Cepi (2007:27) membagi model ini menjadi 4 tahapan, yaitu: “*need assessment, program planning, formative evaluation, dan summative evaluation*”. Berbeda dengan Alkin (1969) dalam Farida Yusuf (2000:15) yang membagi model ini menjadi 5 bagian, yaitu: “*System Assessment, Program Planning, Program Implementation, Program Improvement, dan Program Certification*”. Kedua pendapat tersebut jika dirangkum dapat menjelaskan bahwa evaluasi dapat menjadi suatu proses untuk meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan, dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif pilihan.

6) CIPP Evaluation Model

Evaluasi ini dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk (1967) di *Ohio State University* (Suharsimi dan Cepi, 2007:29). CIPP merupakan singkatan dari *Context*

Evaluation (evaluasi terhadap konteks), *Input Evaluation* (evaluasi terhadap masukan), *Process Evaluation* (evaluasi terhadap proses), dan *Product* (evaluasi terhadap hasil). Model evaluasi ini adalah model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator.

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, atau komponen dari proses sebuah program. Model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai suatu sistem. Jika evaluator menggunakan model CIPP untuk mengevaluasi program, mereka harus menganalisa program tersebut berdasarkan komponen-komponennya.

Rusdiana (2017) membagi tahapan model evaluasi CIPP menjadi 4 bagian adalah :

1) *Context Evaluation* (Evaluasi Konteks)

Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan proyek. Tujuan tahap ini adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluasi, sehingga dapat memberikan arah ke perbaikan yang diperlukan.

2) *Input Evaluation* (Evaluasi Masukan)

Evaluasi masukan berguna untuk mengatur keputusan, menentukan sumber yang ada, alternatif yang diambil, rencana dan strategi yang digunakan, dan prosedur kerja.

3) *Process Evaluation* (Evaluasi Proses)

Evaluasi proses digunakan untuk mengukur seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan pada program yang telah terlaksana, untuk mengetahui rencana yang telah diterapkan dan komponen yang perlu diperbaiki.

4) *Product Evaluation* (Evaluasi Hasil)

Evaluasi hasil adalah penilaian yang dilakukan untuk melihat keberhasilan suatu program dalam mencapai suatu tujuan. Evaluasi ini berguna untuk membantu pemimpin proyek atau guru untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kelanjutan, akhir, ataupun revisi program. Pada tahap ini, evaluator memberikan rekomendasi terhadap program yang telah terlaksana.

Menurut Stufflebeam (1973) dalam Farida Yusuf (2000:14) merumuskan evaluasi sebagai suatu proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi

yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Dia membagi evaluasi menjadi 4 macam bagian, yaitu :

- a) *Context evaluation to serve planning decision.* Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program.
- b) *Input evaluation, structuring decision.* Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.
- c) *Process evaluation, to serve implementing decision.* Evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan. Samapi sejauh mana rencana telah diterapkan? Apa yang harus direvisi? Begitu pertanyaan terjawab, prosedur dapat dimonitor, dikontrol, dan diperbaiki.
- d) *Product evaluation, to serve recycling decision.* Evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya. Evaluasi ini diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah.

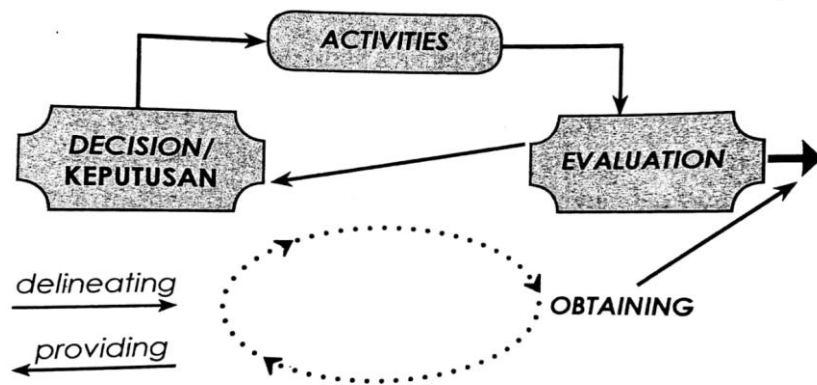
7) *Discrepancy Model*

Kata *discrepancy* (bahasa inggris), memiliki arti “kesenjangan”. Malcolm Provus, ahli yang mengembangkan model ini menekankan pandangannya bahwa adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Menurut Suharsimi dan Capi (2007:31): “evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator, mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen”. Khusus pada model ini yang menekankan pada kesenjangan (syarat umum semua kegiatan evaluasi) yaitu mengukur adanya perbedaan antara yang seharusnya dicapai dengan yang sudah riil tercapai.

e. Model Evaluasi yang Dipilih

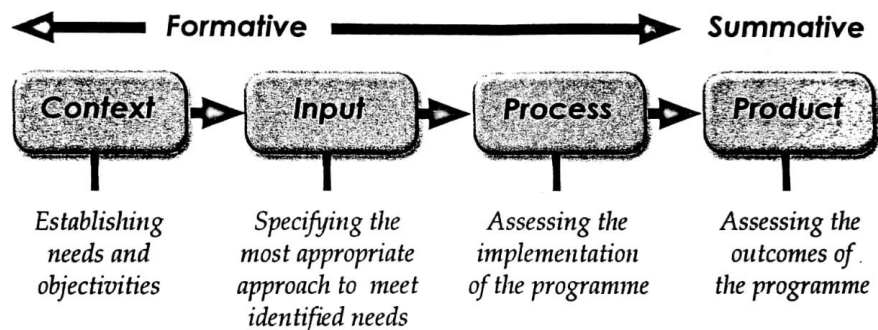
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai evaluasi program PKL ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model evaluasi CIPP (*Contet, Input, Process, Product*). Pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah: “pendekatan yang berbasis pengujian teori yang melibatkan pengukuran yang dinyatakan dengan angka, dianalisis dengan uji statistika tertentu untuk mencari kesimpulan bahwa hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan untuk membuktikan bahwa teori yang digunakan mengandung kebenaran” (Rusdiana 2017:41). Model evaluasi CIPP pada penelitian ini dilakukan dengan menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya, yaitu konteks, masukan, proses dan hasil.

Stufflebeam dalam Rusdiana (2017:41) juga membuat batasan tentang evaluasi sebagai: “*educational evaluation is the process of obtaining and providing useful information for making educational decesion*”. Dapat diartikan proses penyediaan informasi yang berguna untuk membuat keputusan dalam bidang pendidikan. Stufflebeam dan Gupa menggambarkan hubungan antara evaluasi dan pengambilan keputusan dengan pola seperti berikut :



Gambar 1. Hubungan antara Evaluasi dan Pengambilan Keputusan
 Sumber: Stufflebeam dan Guba (1968) dalam Rusdiana (2017)

Keunikan model ini adalah pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambilan keputusan yang menyangkut perencanaan dan operasional sebuah program. Keunggulan model ini adalah memberikan format evaluasi yang komprehensif/ menyeluruh pada setiap tahapan evaluasi, yaitu konteks, masukan, proses, dan produk. Model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sistem. Alur yang akan digunakan dalam evaluasi ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Alur Pelaksanaan Evaluasi CIPP
 Sumber : Stufflebeam dan Guba (1968) dalam Rusdiana (2017)

Arikunto dalam Jurnal Supadi (2017) menjelaskan ada empat tahapan evaluasi. Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan. Evaluasi masukan digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, desain prosedur untuk strategi implementasi, serta pembiayaan dan penjadwalan. Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan dalam program yang sudah terlaksana sesuai dengan rencana dan pedoman yang ditetapkan. Evaluasi produk digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat peneliti buat tabel pembagian isi/inti dari evaluasi CIPP (kontek, masukan, proses, produk) itu sendiri menurut beberapa ahli yang dikutip oleh peneliti. Tabel isi evaluasi CIPP dapat dilihat pada lampiran 1. Tabel ini dimaksudkan untuk membantu dan memudahkan peneliti membuat instrumen penelitian sebagai saran pengambilan data.

Melalui tabel tersebut, dapat peneliti ringkas/pilih beberapa komponen isi yang mendukung penelitian ini seperti:

1. Konteks : Menentukan kebutuhan program
2. Masukan : Menentukan rencana pencapaian kebutuhan
3. Proses : Sejauh apa rencana telah terlaksana
4. Hasil : Hasil dan perubahan apa saja yang telah dicapai

Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan saran/masukan/ rekomendasi bagi penyelenggaraan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Nanggulan. Selain pemberian rekomendasi, evaluasi ini juga dapat memperlihatkan keberhasilan pelaksanaan PKL di SMK Negeri 1 Nanggulan. Sebuah program dinilai berhasil jika tujuan pelaksanaan program dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan/kriteria yang berlaku.

2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

a. Pengertian SMK

Pengertian SMK menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) adalah: “pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan juga mengatakan bahwa: “SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat”. Dalam hal ini, SMK merupakan salah satu sarana masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan kejuruan.

Pendidikan kejuruan menurut Adhikary, P.K. (2005) yang dikutip oleh Putu Sudira (2012:13) adalah: “pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan, kemampuan/kecakapan, pemahaman, sikap, kebiasaan-kebiasaan kerja, dan apresiasi yang diperlukan oleh pekerja dalam memasuki pekerjaan dan membuat kemajuan-kemajuan dalam pekerjaan penuh makna dan produktif”. Hal ini senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 pasal 1 ayat 3 yang mengatakan: “Pendidikan kejuruan adalah pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu”. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa SMK akan fokus pada program pendidikan tertentu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan saat ini di samping mengembangkan keterampilan peserta didiknya dalam bidang tertentu.

b. Tujuan SMK

Tujuan SMK erat hubungannya dengan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1990 pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: “Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional”. Dilihat dari hal tersebut, lulusan SMK dituntut untuk memiliki keterampilan dan sikap profesional

untuk mendukung mereka dalam mencari pekerjaan. Adapun tujuan lain dari SMK yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan yang dikutip dari Jurnal Yoto (2012) sebagai berikut :

- 1) Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- 2) Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat yang dapat bersosial dengan baik;
- 3) Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan IPTEK;
- 4) Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja yang memiliki sikap profesional.

c. Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan

Kompetensi keahlian atau sering disebut jurusan adalah suatu bagian yang mendalami bidang ilmu tertentu. SMK memiliki banyak macam kompetensi keahlian, mulai dari Teknik Informatika, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Pemesinan, dll. Dalam penelitian ini, hanya akan dijelaskan mengenai Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan sebagai fokus utama. Kompetensi Keahlian Teknik

Pemesinan merupakan salah satu kompetensi yang masuk dalam Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa.

Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan adalah kompetensi keahlian yang mempelajari penggunaan/pengoperasian, perawatan, perhitungan, dan keselamatan kerja mesin-mesin perkakas baik secara produktif maupun non produktif. SMK Negeri 1 Nanggulan merupakan salah satu SMK yang memiliki Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan. Mata pelajaran kejuruan yang terdapat di SMK Negeri 1 Nanggulan terutama pada Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan sebagai berikut : (1) SIM-DIG (Simulasi Digital); (2) GTM (Gambar Teknik Manual) (3) DTM (Dasar Teknik Mesin); (4) Praktik Teknik Bubut; (5) Praktik Teknik Frais; (6) NC, CNC & CAM; (7) Praktik Teknik Gerinda (Laporan Individu PLT Evan Adhi Pratama di SMK N 1 Nanggulan 2018).

Tujuan pendidikan pada kompetensi ini adalah membekali peserta didik dengan kemampuan/keterampilan di bidang teknik pemesinan. Setelah lulus, peserta didik diharapkan dapat bekerja sesuai dengan bidang mereka, yaitu teknik pemesinan. Sasaran pekerjaan Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan antara lain, operator mesin perkakas konvensional,

operator/pelaksana pekerjaan *setting* komponen mekanik, operator mesin CNC, dll.

3. Praktik Kerja Lapangan (PKL)

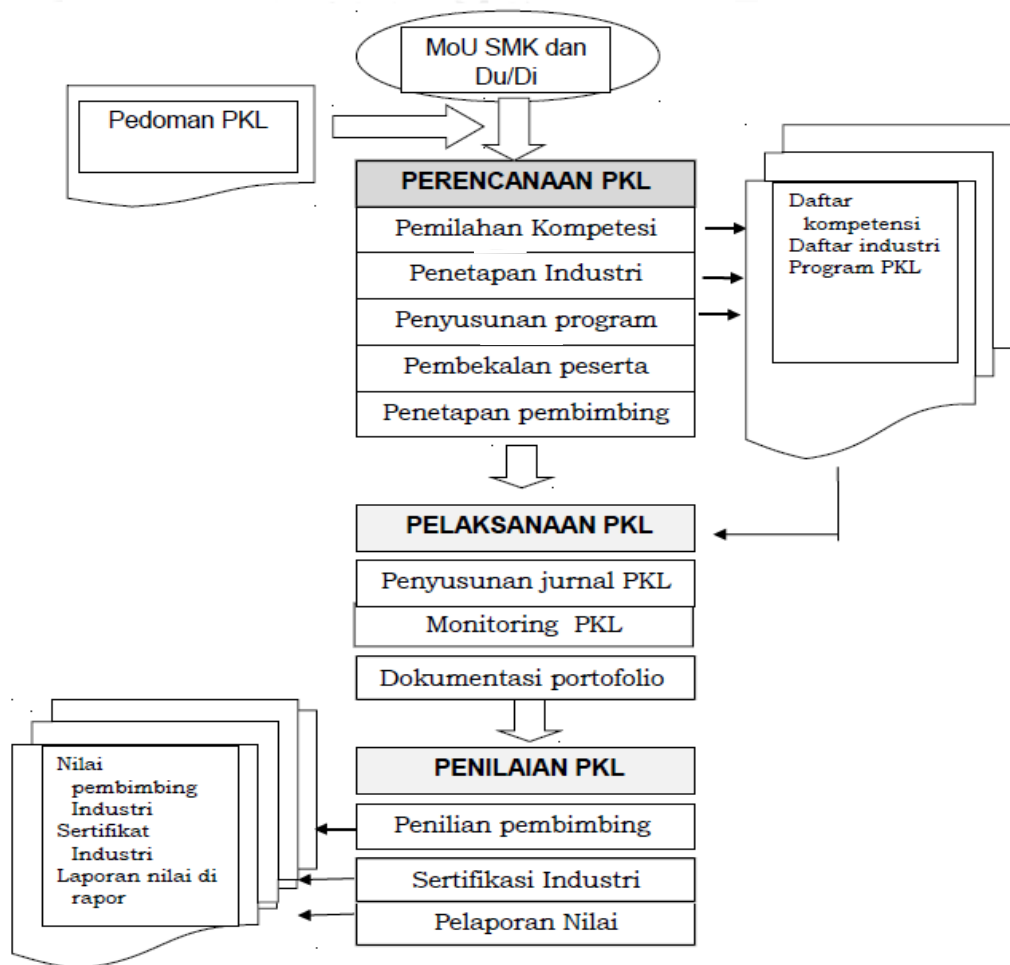
a. Pengertian Praktik Kerja Lapangan

Perkembangan zaman yang semakin maju saat ini mengakibatkan daya saing bangsa bergantung pada pengetahuan dan keterampilan tenaga kerjanya. Pendidikan calon tenaga kerja yang berpengetahuan dan terampil, salah satunya dengan penerapan pendidikan kejuruan di SMK. Penyelenggaraan pendidikan di SMK tidak dapat berjalan baik tanpa kerjasama dengan dunia usaha (DU) dan dunia industri (DI) (Budi, 2012:12 dalam Jurnal Tuatul Mahfud, 2016). Salah satu usaha SMK yang memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik dalam bekerja adalah dengan adanya program Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau yang bisa disebut Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pendapat tersebut juga didukung dengan pendapat Helmut & Eberhard (1983:98) yang mengatakan: “pendidikan teknik & kejuruan yang berkualitas tinggi hanya dapat dicapai dengan menggunakan beberapa tempat belajar”, dalam konteks ini adalah sekolah dan pabrik (DU/DI).

Program PKL sendiri menurut Direktorat Pembinaan SMK (2017) merupakan: “pembelajaran praktik untuk menerapkan, memantapkan, dan meningkatkan kompetensi

peserta didik”. Hal ini sepaham dengan kurikulum SMK yang diterbitkan Dikmenjur (2008) dalam Jurnal Nanik Susana (2016) yang menyebutkan bahwa: “Prakerin atau PKL adalah pola penyelenggaraan diklat yang dikelola bersama-sama antara SMK dengan industri/asosiasi profesi sebagai institusi pasangan (IP), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan sertifikasi yang merupakan satu kesatuan program dengan menggunakan berbagai bentuk alternatif pelaksanaan”.

b. Alur Pelaksanaan PKL



Gambar 3. Alur Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Sumber: Pedoman PKL SMK 2017

Setelah mengetahui alur pelaksanaan PKL secara umum, selanjutnya perlunya dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur agar berjalan secara efektif dan efisien. Charles Prosser pernah mengatakan bahwa ada 16 prinsip pelaksanaan PKL agar efektif dan efisien, namun untuk saat ini, hanya beberapa prinsip tersebut yang relevan. Pelaksanaan PKL yang relevan dengan keadaan saat ini menurut peneliti dari pendapat Prosser dalam Putu Sudira (2012:29) dikatakan bahwa pendidikan kejuruan akan efektif dan efisien jika:

- 1) Lingkungan dimana peserta didik dilatih adalah replika lingkungan dimana nanti ia akan bekerja.
- 2) Tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti di tempat kerja.
- 3) Melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang dilakukan pekerjaan itu sendiri.
- 4) Diberikan kepada seseorang yang memerlukannya, menginginkannya dan yang mendapat untung darinya.
- 5) Pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan berpikir benar diulang-ulang sehingga sesuai seperti yang diperlukan dalam pekerjaan nantinya.
- 6) Pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata.

- 7) Pemenuhan biaya investasi dan operasional tidak begitu besar/tidak terpenuhi, pendidikan vokasi tidak boleh dipaksakan beroperasi.

c. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan PKL menurut Bukit (2014:51) dalam jurnal Sarwo, Suharno & Indah (2017) adalah :

- 1) Mendapat pengalaman bekerja di lini produksi;
- 2) Memahami sikap dan disiplin kerja melalui PKL di lini produksi
- 3) Mendapatkan kompetensi kejuruan sesuai dengan standar kompetensi yang dituntut oleh dunia industri
- 4) Mendapatkan kompetensi sosial (bekerja sama, *probelm solving*)

Tujuan SMK tersebut dapat diperkuat dengan pendapat Billet dan Beven (2008) dalam Jurnal Sarwo, Suharno & Indah (2017) yang menyatakan bahwa: “*job practice meant assist developing students vocational knowledge ababout workpaces, students frequently reported the importance of stories and examples provided by teachers*”. memiliki pengertian PKL dimaksudkan untuk membantu siswa kejuruan mengembangkan pengetahuan tentang tempat kerja, siswa dapat melaporkan kegiatan dan contoh yang diberikan oleh guru. Intinya, PKL dapat memberikan pengalaman nyata bagi siswa guna

melengkapi kebutuhan siswa akan kurangnya pembelajaran praktik yang dilaksanakan di sekolah.

d. Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Menurut Hamalik (2007:93) dalam Jurnal Nanik Susana (2016:580) manfaat dari praktik kerja lapangan adalah :

- 1) Menumbuhkan sikap kerja yang tinggi
- 2) Siswa mendapatkan kompetensi yang tidak didapatkan disekolah
- 3) Siswa dapat memberikan kontribusitenaga kerja di perusahaan
- 4) Memberikan motivasi dan meningkatkan etos kerja siswa
- 5) Mempererat hubungan kerjasama antara sekolah dengan institusi pasangan
- 6) Memungkinkan untuk industri memberikan bantuan kepada sekolah, misal magang guru, bantuan praktik, dsb
- 7) Sebagai promosi tamatan SMK

Helmut & Eberhard (1983:112) juga mengatakan ada beberapa manfaat PKL, yaitu :

- 1) Pendidikan berlangsung dekat dengan kenyataan pabrik
- 2) Pendidikan dapat lekas disesuaikan dengan persyaratan baru yang timbul dalam pasaran tenaga kerja
- 3) Proses belajar berlangsung di tengah-tengah kesibukan serius kerja pabrik
- 4) Biaya pendidikan lebih rendah dibandingkan denan biaya lembaga-lembaga lain, mengingat bahwa peserta didik ikut bekerja
- 5) Peserta didika dapat belajar bersosial dengan kerabat kerja dan atasan
- 6) Peserta didik dapat belajar memahami instruksi dan menaati ketentuan-ketentuan pabrik
- 7) Perseta didik dapat belajar menanggulaingi tekanan mental
- 8) Peserta didik dapat mempelajari bagaimana proses penghindaran risiko kecelakaan di pabrik

e. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan PKL mencakup serangkaian fase yang membantu mengartikulasikan peran peserta didik, guru dan pembimbing industri. Menurut Hansman (2001) dalam Pedoman PKL SMK 2017, Ruang Lingkup PKL meliputi:

- 1) Tahap I : Pengamatan. Peserta didik mengamati kinerja suatu kegiatan di tempat PKL, lalu berencana menerapkan pada kegiatan nyata.
- 2) Tahap II : Meniru Tindakan (*approximating*). Peserta didik meniru tindakan yang dilakukan oleh staff DU/DI / pembimbing industri, lalu mencoba dan membandingkannya.
- 3) Tahap III : Kerja dalam Bantuan dan Pengawasan. Peserta didik mulai bekerja dibawah pengawasan dan bantuan pembimbing industri sesuai dengan standar tempat kerja.
- 4) Tahap IV : Bekerja Mandiri (*Self-directed Learning*). Peserta didik mencoba tindakan nyata di dunia kerja DU/DI dan hanya minta bantuan ketika diperlukan.
- 5) Tahap V : Aktualisasi dan Eksplorasi. Dalam tahap ini peserta didik memberikan tanggapan terhadap pengembangan metode kerja, prosedur kerja, formula dan hal lain yang digunakan di DU/DI.

B. Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan, dan saran serta relevan dengan penelitian ini diantaranya :

Anas (2009) dalam tesisnya yang berjudul: “Evaluasi Pelaksanaan Praktik Kerja Industri Siswa SMK Program Keahlian Teknik Bangunan di Kota Makassar”, menyatakan hasil penelitiannya sebagai berikut, sekolah dan siswa SMK program keahlian Teknik Bangunan siap melaksanakan prakerin, sementara dari pihak DU/DI kesiapan 100% hanya milik industri besar, sisanya hanya 75%. Aktivitas siswa dan guru pembimbing dalam pelaksanaan prakerin tergolong baik dan memuaskan. Perolehan nilai akhir siswa pada prakerin sangat memuaskan sebesar 48,89% dan memuaskan sebesar 40,00%.

Suharyadi (2013) dalam skripsinya yang berjudul: “Evaluasi Pelaksanaan Program Praktik Kerja Industri (Prakerin) Siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan di Kota Yogyakarta”, menyatakan hasil penelitiannya sebagai berikut, kebutuhan siswa pada pelaksanaan program menurut guru pembimbing tergolong baik, namun menurut siswa kurang baik. Kesiapan prakerin menurut guru pembimbing dinyatakan sangat baik, namun menurut siswa hanya dinyatakan baik. Kualitas pelaksanaan program menurut guru pembimbing dan siswa dinyatakan baik. Manfaat pelaksanaan program menurut guru pembimbing sangat baik, sedangkan menurut siswa sudah baik.

Sri Peni (2009) dalam tesisnya yang berjudul: “Evaluasi Program Praktik Kerja Industri Peserta Didik SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen di Kota Yogyakarta”, menyatakan sebagai berikut, dukungan pihak-pihak yang terkait dengan program prakerin sangat baik dan iklim kelas tergolong baik. Kinerja guru mata pelajaran produktif termasuk dalam kategori baik, kesiapan peserta didik sangat baik, sarana dan prasarana di sekolah dan DU/DI sangatlah baik, dan kurikulum program terkategori baik. Kinerja guru pembimbing prakerin dan pembimbing DU/DI termasuk kategori sangat baik, kinerja peserta didik termasuk kategori baik, dan iklim tempat prakerin termasuk kategori baik. Walaupun terdapat beberapa kendala selama prakerin, manfaat yang didapat dari program ini termasuk kategori sangat baik.

Dalam tesis Sulistyio (2008) yang berjudul: “Evaluasi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Siswa Sekolah Menengah Teknologi Industri Yogyakarta”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, sebanyak 4 (57,1%) guru pembimbing dan 43 (72,9%) siswa menyatakan bahwa program PKL masih sangat sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam pelaksanaannya, kesiapan guru pembimbing dinilai baik. Kesiapan siswa dalam melaksanakan PKL dinilai baik. Kualitas pelaksanaan program PKL oleh 3 (42,9%) guru melaksanakan bimbingan dengan baik, sedangkan 26 (44,1%) siswa menyatakan melaksanakan PKL secara baik. Manfaat PKL menurut 4 (57,1%) guru pembimbing dan 37 (62,7%) siswa dinyatakan sangat baik dan sangat bermanfaat.

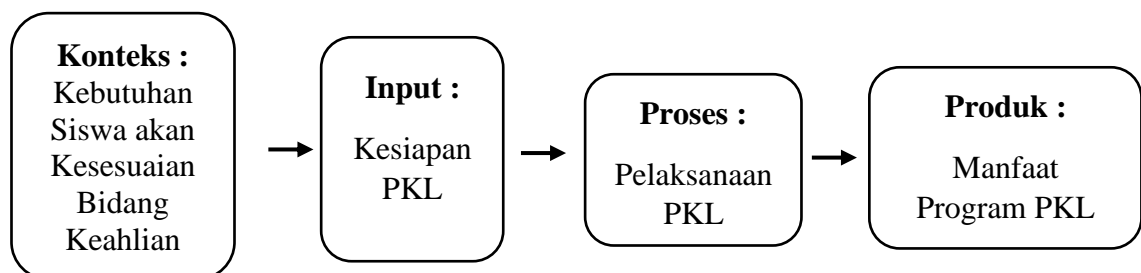
C. Kerangka Berpikir

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan PKL SMK siswa kelas XII Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan di SMK Negeri 1 Nanggulan, sehingga dapat menghasilkan lulusan/*output* yang sesuai dengan permintaan dan tuntutan pasar saat ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan PKL yang kemudian hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan PKL SMK N 1 Nanggulan di tahun ajaran berikutnya.

Penelitian ini dimulai dari mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa, yaitu kesesuaian tempat industri, pekerjaan selama pelaksanaan PKL, dan sarana prasarana dengan Bidang Keahlian Teknik Pemesinan. Setelah itu bagaimanakah kesiapan siswa dalam menyongsong program PKL yang diadakan oleh sekolah, persiapan tersebut meliputi pemahaman isi pembekalan PKL dan penguasaan materi pembelajaran sebagai bekal siswa menghadapi PKL. Selanjutnya program akan terlaksana, dan dari situ dapat diketahui apakah siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan baru melalui bekal ilmu yang telah didapkannya di sekolah? Bagaimanakah tingkat kedisiplinan siswa? Apakah sudah melakukan kegiatan rutin sesuai dengan pedoman? Dan bagaimanakah komunikasi siswa dengan pembimbing selama pelaksanaan PKL? Terakhir adalah hasil pelaksanaan program, yang terdiri dari manfaat yang didapatkan setelah berlangsungnya PKL dan sebuah pertanyaan apakah PKL perlu dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya?

Penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, untuk siswa dan guru pembimbing. Setelah mengetahui bagian siswa, selanjutnya akan dibahas mengenai bagian guru. Alur kedua penelitian sebenarnya terdapat beberapa kemiripan, yaitu dimulai dari kebutuhan akan kesesuaian dengan Bidang Keahlian, hal tersebut terdiri dari pemilihan industri yang selektif yang berdasarkan kurikulum yang berlaku di sekolah. Lalu bagian persiapan, yaitu pembekalan terhadap siswa maupun orang tua siswa dan melakukan penyusunan program PKL yang bekerja sama dengan pihak industri terkait. Selanjutnya merupakan bagian pelaksanaan, yaitu guru pembimbing melakukan komunikasi dengan pihak industri terkait dan dengan anak didiknya untuk memantau keadaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terakhir adalah hasil pelaksanaan yang terdiri dari manfaat yang didapatkan setelah berlangsungnya PKL.

Kerangka berpikir dalam penelitian tersebut dapat dirangkum jadi satu dalam gambar yang mengacu pada pendekatan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) sebagai berikut :



Gambar 4. Alur Pelaksanaan Evaluasi Program Praktik Kerja Lapangan Siswa SMK N 1 Nanggulan Kelas XII Bidang Keahlian Teknik Pemesinan

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka akan terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang bersumber pada rumusan masalah pada BAB 1 dan terdapat beberapa pengembangan pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Apakah pelaksanaan program PKL bagi siswa Tahun Ajaran 2017/2018 bidang keahlian Teknik Pemesinan SMK N 1 Nanggulan telah sesuai dengan kebutuhan?
- 2) Bagaimanakah proses perencanaan PKL siswa Tahun Ajaran 2017/2018 bidang keahlian Teknik Pemesinan SMK N 1 Nanggulan?
- 3) Bagaimanakah pelaksanaan PKL siswa Tahun Ajaran 2017/2018 bidang keahlian Teknik Pemesinan SMK N 1 Nanggulan?
- 4) Bagaimanakah intensitas monitoring guru pembimbing pada siswa selama pelaksanaan PKL?
- 5) Menurut pandangan guru pembimbing, bagaimanakah sikap kerja siswa selama mengikuti program PKL?
- 6) Apa saja manfaat yang didapat dari pelaksanaan PKL siswa tahun ajaran 2017/2018 bidang keahlian Teknik Pemesinan SMK N 1 Nanggulan?